

HUBUNGAN STATUS DAN FASILITAS PENDIDIKAN DENGAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Rubiyatno

Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma,
Mrican Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55002
e-mail: rubi@usd.ac.id

Abstract: *This study aims to empirically examine the relationship between educational status and human development, and educational facilities and human development. The research used descriptive and non-parametric correlation analysis. The research concluded that: most of the variables indicating the status of education did not have relationship with human development, only a variable of junior high school graduates had a relationship with people's purchasing power, most of the variables indicating educational facilities did not have relationship with human development, only a variable of junior high school had a relationship with people's purchasing power*

Keywords: *human development index, educational status, and educational facilities*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara status pendidikan dan pengembangan manusia dan hubungan antara fasilitas pendidikan dengan pengembangan manusia. Analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi non parametrik. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hampir semua variabel menunjukkan bahwa status pendidikan tidak menunjukkan hubungan dengan pengembangan manusia. Hanya variabel jumlah lulusan SMP mempunyai hubungan dengan daya beli masyarakat. Hasil lain menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan tidak menunjukkan hubungan dengan pembangunan manusia, hanya variabel jumlah murid SMP yang mempunyai hubungan dengan daya beli masyarakat.

Kata-kata kunci: *indeks pembangunan manusia, status pendidikan, fasilitas pendidikan*

Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional.

Terpuruknya perekonomian negara ditambah semakin merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara langsung membuat masyarakat menjadi tidak berdaya. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat, keluarga jalanan dan anak jalanan menjadi masalah sosial yang menonjol di perkotaan, masalah kriminalitas yang makin meningkat, ditambah dengan masalah sosial lainnya yang membuat masyarakat tidak berdaya

memenuhi kebutuhan pokoknya serta anak-anak putus sekolah pada semua jenjang pendidikan makin bertambah.

Perkembangan pendidikan di Indonesia berdasarkan data BPS (Business News, 7266/28-9-2005) dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2004 (satu dasawarsa) sebenarnya nampak membaik. Artinya persentase penduduk 10 tahun ke atas yang belum sekolah turun dari 13,04% menjadi 7,92%. Hal itu menunjukkan semakin banyak penduduk yang menikmati pendidikan. Dilihat dari partisipasi sekolah (*school enrollment*) penduduk usia 7-12 tahun meningkat dari 94,38% menjadi 96,77%, penduduk usia 13-15 tahun meningkat dari 72,38% menjadi 83,49% dan usia 16-18 tahun meningkat dari 45,31% menjadi 53,48% selama kurun waktu yang sama.

Berdasarkan sumber data yang sama, tingkat pencapaian pendidikan (*education attainment*) penduduk 10 tahun ke atas juga membaik. Bila

tahun 1994 sekitar 70% berpendidikan SD ke bawah, maka pada tahun 2004 angkanya turun menjadi sekitar 55%. Ini berarti semakin banyak penduduk yang berpendidikan lebih tinggi dari SD. Namun yang menjadi pertanyaan banyak orang apakah segi kuantitas ini menjamin kualitas manusia secara keseluruhan.

Angka *human development index* (HDI) mencerminkan kualitas manusia, pertama kali dikembangkan oleh Mahbub ul Haq pada tahun 1990 dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada laporan tahunannya. Dalam pemeringkatan HDI sebuah negara atau propinsi, UNDP mengukur melalui tiga komponen, yakni indeks pendidikan (*melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama pendidikan*), indeks kesehatan (*rata-rata usia harapan hidup*), dan indeks perekonomian (*purchasing power parity* atau pengeluaran per tahun per kapita).

Program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menempatkan HDI Indonesia tahun 2004 pada urutan 111 dari 175 negara. Posisi tersebut satu tingkat lebih baik dari Vietnam (112), tetapi di bawah Malaysia (59), Thailand (83), China (94). Dari lima tahun ke depan Indonesia menargetkan masuk posisi 90 besar. Kondisi HDI yang masih belum baik di Indonesia tidak lepas dari buruknya pengembangan di bidang pendidikan.

Dari berbagai studi yang telah dilakukan (Steedman, 1996), pengukuran pendidikan secara kuantitas melalui *school enrollment rate* (Lee and Psacharopoulos, 1979) dalam penelitian di negara berkembang telah mengalami kegagalan dalam hal membandingkan kualitas output pendidikan, terutama jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Hanushek dan Kim (1995) dan sebelumnya Mankiv *et al.*, (1992) mengukur variabel pendidikan segi kualitas, yakni *human capital*.

Kajian relasi antara pendidikan dan pembangunan manusia memang sudah banyak dilakukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu cara untuk mengangkat martabat bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat adalah melalui jalan pengembangan

pendidikan (*improving in education*). Banyak diyakini bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan berkorelasi positif dengan tingkat penghasilan atau kemakmuran. Seperti halnya kesehatan, pendidikan merupakan bidang sentral yang harus digarap serius untuk mempercepat pembangunan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah semakin tingginya angka putus sekolah karena alasan ekonomi, memperbaiki kualitas pembelajaran, mengembangkan sarana dan infrastruktur sekolah. Jadi perbaikan memang bukan sekedar kuantitas, melainkan juga kualitas dan layanan pendidikan.

Sudah sering ditulis maupun didiskusikan, bahwa di antara ke empat faktor dinamika dan perkembangan ekonomi jangka penjang, yakni sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sumber daya alam (SDA), dan *product capacity*, peranan sumber daya manusia mengambil tempat paling sentral. Artinya, kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Faktor pembangunan manusia memegang peran penting dan sentral dalam konteks pembangunan ekonomi. Bila ini semua dapat dilakukan, maka bukan hanya sekedar pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga sekaligus dapat mengurangi angka-angka kemiskinan. Persoalannya, bagaimana sumber daya manusia ini harus mampu mengelola dan menguasai sumber daya lainnya, sangat tergantung pada pendidikan yang ditempuh. Jadi kuncinya terletak pada pendidikan.

Variabel pendidikan dalam penelitian ini akan dihubungkan dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Todaro (1997) menghasilkan kesimpulan bahwa percepatan dan pemerataan pendidikan formal secara kuantitatif kerap diartikan sebagai kesuksesan pembangunan, mitos seperti inilah yang berkembang selama ini. Di Indonesia pendidikan lebih dinilai sebagai status sosial daripada produktivitas (Wicaksono, Kompas 21 Agustus 2004).

Suatu pertanyaan, mengapa perlu mencari hubungan antara pendidikan dengan pembangunan manusia? Hal ini dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat dilihat dari *health status and service, education, household and social service* dan *employment*, sehingga empat indikator inilah yang sangat menentukan seberapa jauh kualitas pembangunan manusia. Tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang baik akan mendukung tercapainya kualitas pembangunan manusia suatu negara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bila manusia semakin sejahtera maka akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan. Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka masalah yang akan diuji adalah apakah ada hubungan antara status dan fasilitas pendidikan dengan pembangunan manusia?

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk menguji secara empiris hubungan antara status pendidikan dengan pembangunan manusia dan menguji secara empiris hubungan antara fasilitas pendidikan dengan pembangunan manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah atau pengambil keputusan di bidang pendidikan agar pengembangan pendidikan mampu mewujudkan kualitas manusia yang ditunjukkan dengan *Human Development Index*.

Konsep pengukuran indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia, pertama kali dikembangkan oleh Mahbub ul Haq pada tahun 1990, dan telah digunakan sebagai sebagai laporan tahunan *United Nations Development Program* sejak tahun 1993. Dalam pemeringkatan HDI sebuah negara atau propinsi, UNDP mengukur melalui tiga komponen yaitu indek pendidikan, indek kesehatan dan indeks perekonomian. Pada tahun 2004, HDI Indonesia menempati urutan 111 dari 177 negara dengan nilai HDI 0,71. Sementara negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina menempati peringkat yang lebih baik. Pemeringkatan HDI pada dasarnya dibedakan: *High Human Development* (nilai HDI antara 0,8-1,0), *Medium*

Human Development (nilai HDI antara 0,5-0,79) dan *Low Human Development* (nilai HDI < 0,5)

Pada dasarnya HDI adalah suatu alat ukur untuk mengetahui kualitas penduduk/sumber daya manusia suatu negara atau propinsi. Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur tiga dimensi tersebut adalah sebagai berikut (UNDP, *Human Development Report*, 1993): *Longevity*, diukur dari variabel harapan hidup saat lahir (*life expectancy birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*Infant Mortality Rate*), *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yaitu tingkat melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*Adult Literacy Rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (*the man years of schooling*) dan *Access to Resource*, diukur melalui PDB real per kapita dengan terminologi *Purchasing Power Parity* dalam dolar AS dan dilengkapi dengan tingkat angkatan kerja.

Dari berbagai indikator tersebut, HDI merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu bangsa. Implikasinya HDI yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi sebaliknya HDI rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi suatu negara.

Teori tentang pembangunan manusia dimulai dari aliran atau Mazhab Klasik. Faktor modal dan faktor tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) dijadikan sebagai faktor yang bersifat variabel, sedang faktor tanah dan sumber daya alam (SDA) sebagai faktor *fixed*. Teori Mazhab klasik ini menekankan pentingnya sumber daya manusia yang harus terus menerus ditingkatkan untuk memajukan ekonomi suatu bangsa.

Teori SDM dan pembangunan yang dikemukakan oleh pakar ekonomi Indonesia Djojohadikusumo (1994) mengatakan bahwa SDM memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi agar kebutuhan dasar terpenuhi, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu pendidikan dan

kesehatan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang termasuk prioritas utama, maka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya layanan pendidikan dan kesehatan sangat menentukan kualitas SDM.

Hasil riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian PBB (UNSRID) menunjukkan bahwa berbagai indikator indeks pembangunan dan indikator sosial ekonomi memiliki hubungan lebih nyata dengan derajat korelasi tinggi dibandingkan dengan hubungan antara indeks pembangunan dengan PDB per kapita (Todaro, 1989). Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara kesejahteraan sosial ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

Newman, John *et al.* (2002) melakukan studi mengenai dampak investasi dana sosial terhadap pendidikan, kesehatan dan suplai air di Bolivia. Hasil penelitian ini ikut memberi kontribusi atas hasil penelitian sebelumnya, dalam rangka mencari upaya pengembangan yang efektif terhadap kualitas infrastruktur di bidang pendidikan (Hanushek, 1995), bidang kesehatan (Alderman, 1996) dan air minum (Brockerhoff & Derose, 1996). Sementara itu Pradhan dan Rawling (2002) meneliti target investasi infrastruktur di Nicaragua. Penelitian menunjukkan dampak investasi sosial bagi peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia terutama masyarakat miskin.

Dalam rencana aksi hak dasar yang merupakan bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 2006-2009, pendidikan merupakan salah satu prioritas kebijakan yang menekankan realisasi bertahap dan progresif dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Data dari Bapenas menyebutkan target penanggulangan kemiskinan pada tahun 2007 adalah menurunkan jumlah masyarakat miskin menjadi 14,4%. Langkah ini akan tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Sedangkan berdasarkan urutan sembilan sektor prioritas pembangunan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan menempati urutan ke 4 dari 9 sektor prioritas.

Menurut McRay (1994), fenomena kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di Asia Timur pada dasarnya merujuk pada faktor-faktor: keluwesan untuk melakukan diversifikasi produk sesuai dengan tuntutan pasar, kemampuan penguasaan teknologi cepat melalui *reverse engineering* (contoh: *computer clone*), besarnya tabungan masyarakat, mutu pendidikan yang baik dan etos kerja.

Diantara faktor-faktor tersebut, pendidikan (faktor 4) merupakan simpul atau katalisator yang menyebabkan faktor-faktor 1,2,3 dan 5 terjadi (*brought into being*). Ilustrasi ini memberikan aksentuasi tentang betapa pembangunan pendidikan sebagai upaya pengembangan sumberdaya manusia (SDM) menjadi semakin penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi, peluang untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dari suatu negara akan semakin besar jika didukung oleh SDM yang memiliki: pengetahuan dan kemampuan dasar untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika pembangunan yang tengah berlangsung; jenjang pendidikan yang semakin tinggi; keterampilan keahlian yang berlatar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang baik dari kualitas maupun harga, mampu bersaing dengan produk-produk lainnya di pasar global. Kata kunci dari tujuan pendidikan ialah perubahan perilaku. Unsur-unsur perilaku ini selalu merujuk kepada apa yang telah diketahui atau dipahami oleh peserta didik (*Knowledge*), apa yang dapat mereka lakukan (*Skills*), apa yang mereka rasakan/pikirkan (*Attitudes*) dan apa yang mereka kerjakan (*Action*). Apabila pengertian perilaku ini lebih disederhanakan maka, perilaku dapat dibagi menjadi 2 unsur yang saling berhubungan satu sama lain yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan Intelektual (KI) contohnya masyarakat Barat yang rasional dan individualistis, di mana mereka cenderung mendengarkan apa "kata kepala", sedangkan Kecerdasan Emosional (KE) contohnya masyarakat Timur yang masih terikat kepada

tradisi yang cenderung mendengarkan apa “Kata Hati”. Hasil penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam berprestasi ditentukan oleh hanya 20 persen dari KI-nya sedangkan 80 persen oleh faktor lain, terutama KE-nya (Tampubolon, 2006).

Studi yang lain tentang hubungan antara tingkat pendidikan wanita dengan tingkat kematian anak yang dilakukan oleh Mellington dan Cameron (1999:137) menunjukkan bahwa wanita yang menyelesaikan sekolah menengah secara umum lebih efektif dalam menurunkan tingkat kematian anak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi pada *human capital* terutama pada wanita akan menurunkan tingkat kematian. Hasilnya setiap tambahan lama sekolah sebesar satu tahun pada sekolah dasar akan menurunkan 1,7% penurunan kematian anak. Sedangkan pada sekolah menengah akan menurunkan 2% kematian anak.

Studi tentang hubungan pendidikan orang tua dengan status gizi anak di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan orang tua akan meningkatkan status gizi anak. Status gizi anak tergantung pada jenis kelamin dan umur anak. Hal lain yang ditemukan adalah ibu dengan pendidikan sekolah menengah memiliki anak laki-laki yang lebih sehat daripada ibu dengan pendidikan lebih rendah (Skoufias, 1999:114).

Temuan lain oleh Oey-Gardiner (dalam Jones and Hagul, 1998: 210) menunjukkan bahwa dari tahun 1993 sampai tahun 1999 terjadi peningkatan jumlah siswa sekolah dasar yang masuk kelas I dibawah umur 5 dan 6 tahun. Peningkatan yang terjadi adalah 15% menjadi 22%. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran, sehingga sekolah mau menerima siswa di bawah umur 7 tahun (Jones and Hagul, 1998: 210).

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang diperoleh dari UNDP dan Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian

dilaksanakan mulai bulan Juni 2007 sampai Desember 2007. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah status pendidikan ditunjukkan dari jumlah anak SD, Jumlah lulusan SD, Jumlah anak SMP dan Jumlah lulusan SMP, fasilitas pendidikan ditunjukkan dari jumlah sekolah dasar, jumlah SMP, rasio murid dengan guru SD, rasio murid dengan guru SD, jumlah murid tiap kelas di SD dan jumlah murid tiap kelas di SMP dan pembangunan manusia ditunjukkan dari indeks kesehatan (harapan hidup), indeks pendidikan (melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama pendidikan), indeks daya beli (pengeluaran per kapita/tahun) dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Sedangkan definisi operasional dari masing indikator yang mewakili variabel adalah sebagai berikut: jumlah anak SD didasarkan pada data jumlah siswa Sekolah Dasar masing-masing propinsi pada tahun penelitian, jumlah lulusan SD didasarkan pada data jumlah siswa SD masing-masing propinsi yang lulus pada tahun penelitian, jumlah anak SMP didasarkan pada data jumlah siswa SMP masing-masing propinsi pada tahun penelitian, jumlah lulusan SMP didasarkan pada data jumlah siswa SMP masing-masing propinsi yang lulus pada tahun penelitian, jumlah SD didasarkan pada jumlah SD di masing-masing propinsi pada tahun penelitian, jumlah SMP didasarkan pada jumlah SMP di masing-masing propinsi pada tahun penelitian, rasio murid dengan guru merupakan jumlah murid dibagi dengan jumlah guru SD, rasio murid dengan guru merupakan jumlah murid dibagi dengan jumlah guru SMP, jumlah murid tiap kelas di SD masing masing propinsi pada tahun penelitian, jumlah murid tiap kelas di SMP masing masing propinsi pada tahun penelitian, indeks kesehatan (harapan hidup) didasarkan pada rata-rata umur harapan hidup tiap-tiap propinsi, indeks pendidikan didasarkan pada prosentase jumlah penduduk melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama pendidikan, indeks daya beli didasarkan pada pengeluaran per kapita/tahun dan indeks manusia didasarkan pada rata-rata tertimbang indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi non parametrik. Analisis ini dipilih dengan pertimbangan belum diyakini bahwa data dari variabel memiliki distribusi tertentu dikarenakan jumlah pengamatan hanya 33 propinsi dan hubungan antar variabel yang akan diteliti belum diyakini variabel tertentu sebagai variabel independen yang mempengaruhi variabel lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan pembangunan manusia seperti telah diuraikan di bagian sebelumnya akan dilihat dari 3 dimensi, yaitu dari harapan hidup yang menggambarkan keadaan kesehatan, melek huruf dan lama sekolah yang menggambarkan keadaan pendidikan dan daya beli menggambarkan keadaan ekonomi melalui pengeluaran riil per kapita. Sedang kondisi secara umum

Tabel 1. Data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2004

No	Propinsi	Human Development				
		LE (tahun)	ALR (%)	MYS (tahun)	RE (Rp/kapita)	HDI (%)
1	Naggroe Aceh Darussalam	67.9	95.7	8.4	585.8	68.7
2	Sumatera Utara	68.2	96.6	8.4	616.6	71.4
3	Sumatera Barat	67.6	95.7	7.9	615.7	70.5
4	Riau	69.8	96.4	8.2	616.6	72.2
5	Jambi	67.6	95.8	7.4	615.1	70.1
6	Sumatera Selatan	67.7	95.7	7.4	608.4	69.6
7	Bengkulu	67.4	94.2	7.8	615.5	69.9
8	Lampung	67.6	93.1	7	604.8	98.4
9	Bangka Belitung	67.2	93.5	6.5	627.2	69.6
10	Kepulauan Riau	68.8	94.7	8	613	70.8
11	DKI Jakarta	72.4	98.3	10.4	618.1	75.8
12	Jawa Barat	66.7	94	7.2	616.1	69.1
13	Jawa Tengah	69.7	86.7	6.5	618.7	68.9
14	D.I. Yogyakarta	72.6	85.8	8.2	636.7	72.9
15	Jawa Timur	67.2	84.5	6.6	616.6	66.8
16	Banten	63.3	94	7.9	618	67.9
17	Bali	70.2	85.5	7.3	614.8	69.1
18	Nusa Tenggara Barat	59.4	78.3	6.4	611	60.6
19	Nusa Tenggara Timur	64.4	85.2	6.2	585.1	62.7
20	Kalimantan Barat	64.8	88.2	6.4	606.7	65.4
21	Kalimantan Tengah	69.8	96.2	7.8	615.5	71.7
22	Kalimantan Selatan	61.6	94.8	7.2	619.8	66.7
23	Kalimantan Timur	69.7	95	8.5	620.2	72.2
24	Sulawesi Utara	71	99.1	8.6	611.9	73.4
25	Sulawesi Tengah	64.6	94.4	7.5	604.4	67.3
26	Sulawesi Selatan	68.7	84.5	6.8	615.2	67.8
27	Sulawesi Tenggara	66	90.7	7.5	596.1	66.7
28	Gorontalo	64.5	94.7	6.8	585.9	65.4
29	Sulawesi Barat	66.3	82.9	5.9	602.2	64.4
30	Maluku	66.2	97.8	8.4	596.1	69
31	Maluku Utara	63.3	95.2	8.5	588.8	66.4
32	Papua Barat	66.8	85.1	7.1	571.5	63.7
33	Papua	65.8	74.2	6.1	583.8	60.9

Keterangan:

LE = angka harapan hidup, ALR = angka melek huruf
 MYS = rata-rata lama sekolah, RE = pengeluaran riil per kapita
 HDI = indeks pembangunan manusia

Sumber: BPS 2007

dilihat dari indeks pembangunan manusia. Semua data tersebut diperoleh dari *United Nation Development Program* Indonesia yang diterbitkan tahun 2007. Deskriptif kondisi pembangunan manusia Indonesia seperti pada Tabel 1.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa harapan hidup terendah adalah 59,4 yaitu di propinsi Nusa Tenggara Timur, nilai tertinggi sebesar 73,6 yaitu di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini menunjukkan bahwa untuk propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat harapan hidup penduduknya lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi yang lain. Sedangkan harapan hidup rata-rata nasional adalah 67,12. Dari 33 propinsi terdapat 14 Propinsi yang nilai harapan hidupnya lebih rendah dari rata-rata nasional yakni propinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Banten, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, Jawa Barat dan Papua Barat. Sedangkan 19 Propinsi lebih besar dari rata-rata nasional yaitu propinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatra Barat, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, kepulan Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa melek huruf terendah adalah 74,20 yaitu di propinsi Papua, angka tertinggi sebesar 99,10 yaitu di propinsi Sulawesi Utara. Rata-rata nasional angka melek huruf adalah 91,4091. Dari 33 propinsi terdapat 12 propinsi yang nilai melek hurufnya lebih rendah dari rata-rata nasional yakni Propinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Derah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan 21 propinsi lebih besar dari rata-rata nasional yaitu propinsi Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nanggroe

Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Utara, Maluku, DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia memiliki angka melek huruf lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa lama sekolah adalah 5,9 yaitu propinsi Sulawesi Barat, angka tertinggi sebesar 10,40 yaitu propinsi DKI Jakarta. Sedangkan rata-rata nasional adalah 7,4788. Dari 33 propinsi terdapat 17 propinsi yang lama sekolahnya lebih rendah dari rata-rata nasional yakni Propinsi Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sedangkan 16 propinsi lebih besar dari rata-rata nasional yaitu propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa daya beli terendah 571,70 yaitu propinsi Papua Barat, daya beli tertinggi sebesar 636,70 yaitu propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daya beli secara rata-rata nasional adalah 608,2394. Dari 33 propinsi terdapat 12 propinsi yang memiliki daya beli lebih rendah dari rata-rata nasional yakni Propinsi Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sedangkan 21 propinsi lebih besar dari

Tabel 2. Deskriptif Indeks Pembangunan Manusia

No	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
1	LE	33	59	73	67,12
2	ALR	33	74,20	99,10	91,4091
3	MYS	33	5,90	10,40	7,4788
4	RE	33	571,50	636,70	608,2394
5	HDI	33	60,60	98,40	69,2727

Sumber: Data diolah

rata-rata nasional yaitu propinsi Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bali, Jambi, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia terendah 60,60 yaitu propinsi Nusa Tenggara Barat, nilai tertinggi sebesar 98,40 yaitu Propinsi Lampung. Besarnya

indek pembangunan manusia rata-rata secara nasional adalah 69,2727. Dari 33 propinsi terdapat 19 propinsi yang besarnya Indeks Pembangunan Manusiannya lebih rendah dari rata-rata nasional yakni Propinsi Nusa Tenggara Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, dan Bali. Sedangkan 14 propinsi lebih besar

Tabel 3. Keadaan Status Pendidikan

No	Propinsi	Status Pendidikan			
		ANSD	LULUSSD	ANSMP	LULSMP
1	Nanggroe Aceh Darussalam	551.707	70.015	176.546	49.437
2	Sumatera Utara	1.778.183	255.434	581.483	182.109
3	Sumatera Barat	654.302	89.143	182.592	597.91
4	Riau	613.880	82.999	162.945	46.867
5	Jambi	37.629	50.083	999.70	31.296
6	Sumatera Selatan	918.239	118.849	251.723	77.957
7	Bengkulu	233.859	29.508	63.364	20.578
8	Lampung	1.039.199	136.816	280.285	87.350
9	Bangka Belitung	127.858	17.244	40.430	11.902
10	Kepulauan Riau	128.589	16.079	29.893	8.809
11	DKI Jakarta	841.729	124.729	365.847	120.842
12	Jawa Barat	4.342.979	647.328	1.131.461	360.533
13	Jawa Tengah	3.482.345	547.745	1.132.352	378.376
14	D.I. Yogyakarta	290.494	44.122	125.584	41.039
15	Jawa Timur	3.291.239	482.645	1.063.148	338.737
16	Banten	1.168.345	172.998	261.483	76.687
17	Bali	371.490	50.789	129.692	41.591
18	Nusa Tenggara Barat	563.593	78.238	133.673	40.586
19	Nusa Tenggara Timur	641.910	69.089	155.982	42.142
20	Kalimantan Barat	626.396	74.426	150.554	43.790
21	Kalimantan Tengah	290.540	34.377	53.141	17.233
22	Kalimantan Selatan	386.072	50.708	80.296	23.496
23	Kalimantan Timur	383.330	47.420	107.120	32.576
24	Sulawesi Utara	241.916	28.686	87.356	24.900
25	Sulawesi Tengah	317.056	42.450	76.469	22.347
26	Sulawesi Selatan	992.347	131.477	280.626	87.102
27	Sulawesi Tenggara	333.099	45.559	94.847	26.533
28	Gorontalo	138.302	15.932	24.207	7.095
29	Sulawesi Barat	145.809	18.279	33.449	8.874
30	Maluku	211.718	25.976	63.008	520
31	Maluku Utara	159.756	20.357	31.484	806
32	Papua Barat	98.258	9.256	21.698	255
33	Papua	262.274	25.428	80.382	800

Keterangan:

ANSD = jumlah anak SD, LULUSSD = jumlah anak lulus SD

ANSMP = jumlah anak SMP, LULSMP = jumlah anak lulus SMP

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007

Tabel 4. Keadaan Fasilitas Pendidikan

No	Propinsi	Fasilitas Pendidikan					
		Juml. SD	Juml. SMP	RGU MURSD	RGMURSM	MURPKLSD	MURPKL SM
1	Naggroc Aceh Darussalam	3.214	576	17	11	24	33
2	Sumatera Utara	9.822	1.072	20	15	26	40
3	Sumatera Barat	4.642	482	17	13	22	36
4	Riau	3.130	528	19	14	25	38
5	Jambi	2.313	378	18	14	24	37
6	Sumatera Selatan	4.730	813	21	12	27	33
7	Bengkulu	1.302	244	17	14	25	30
8	Lampung	4.573	915	22	14	29	38
9	Bangka Belitung	787	128	17	17	25	38
10	Kepulauan Riau	675	107	19	14	27	32
11	DKI Jakarta	3.034	865	22	16	31	39
12	Jawa Barat	20.299	2.522	25	15	29	38
13	Jawa Tengah	20.331	2.698	19	16	27	39
14	D.I. Yogyakarta	2.062	418	14	11	22	35
15	Jawa Timur	20.771	3.023	17	13	24	39
16	Banten	4.321	613	26	18	31	36
17	Bali	2.421	307	16	12	24	37
18	Nusa Tenggara Barat	2.785	340	23	14	30	37
19	Nusa Tenggara Timur	4.113	666	18	14	24	34
20	Kalimantan Barat	4.134	661	8	14	11	34
21	Kalimantan Tengah	2.830	373	19	10	27	27
22	Kalimantan Selatan	2.896	375	14	10	21	30
23	Kalimantan Timur	2.115	476	10	12	15	32
24	Sulawesi Utara	2.378	517	12	12	16	30
25	Sulawesi Tengah	2.685	330	17	13	18	33
26	Sulawesi Selatan	6.167	853	20	13	24	37
27	Sulawesi Tenggara	2.359	275	19	15	25	36
28	Gorontalo	1.000	111	18	9	22	28
29	Sulawesi Barat	1.081	123	26	17	25	33
30	Maluku	1.640	312	18	9	18	32
31	Maluku Utara	1.202	164	19	12	24	29
32	Papua Barat	729	86	22	15	23	36
33	Papua	1.792	293	19	15	23	37

Keterangan:

JML SD = jumlah SD, JML SMP = jumlah SMP,

RGUMURSD= rasio guru murid SD, RGUMURSM = rasio guru murid SMP,

MURPKLSD = murid per kelas SD, MURPLSM = murid per kelas SMP

Sumber: Depdiknas 2007

dari rata-rata nasional yaitu propinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta dan Lampung.

Data mengenai status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dapat dilihat pada Tabel 3. Sedang data mengenai

fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru murid SD, rasio guru murid SMP, murid per kelas SD dan murid per kelas SMP dapat dilihat pada Tabel 4.

Adapun deskripsi dari status dan fasilitas pendidikan dapat dilihat dalam Tabel 5. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa status pendidikan jika dilihat dari jumlah anak usia SD yang terendah adalah sebesar 98.258 yaitu di Propinsi Papua Barat. Sedangkan jumlah anak SD terbanyak

Tabel 5. Deskripsi tentang Status dan Fasilitas Pendidikann

No	Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
1	ANSD	33	98.258	3.342.979	775.680
2	LULUSD	33	9.256	647.328	110.825
3	ANSMP	33	21.698	1.132.352	228.881
4	LULSMP	33	255	378.376	70.089
5	JMLSD	33	675	20.771	4.478
6	JMLSMP	33	86	3.023	655
7	RGUMURSD	33	8,34	25,84	18,3424
8	RGUMURSM	33	8,65	18,09	13,3149
9	MURPKLSD	33	10,87	30,76	23,8754
10	MURPKLSM	33	27,06	40,45	34,7352

Tabel 6. Hasil Perhitungan Korelasi Rank Spearman

		HARHID	MELHUR	LAMSEK	DAYBEL	IPM
ANSD	Correlation Coefficient	.140	.010	-.050	.347	.179
	Sig. (2-tailed)	.436	.954	.783	.048	.318
	N	33	33	33	33	33
LULUSSD	Correlation Coefficient	.158	.003	-.021	.422	.210
	Sig. (2-tailed)	.381	.989	.906	.014	.240
	N	33	33	33	33	33
ANSMP	Correlation Coefficient	.263	-.018	-.003	.396	.250
	Sig. (2-tailed)	.139	.919	.987	.023	.161
	N	33	33	33	33	33
LULSMP	Correlation Coefficient	.317	.016	.014	.460*	.316
	Sig. (2-tailed)	.072	.929	.937	.007	.073
	N	33	33	33	33	33
JMLSD	Correlation Coefficient	.120	.022	-.082	.302	.132
	Sig. (2-tailed)	.505	.902	.649	.088	.465
	N	33	33	33	33	33
JMLSMP	Correlation Coefficient	.273	.115	.045	.384*	.307
	Sig. (2-tailed)	.125	.523	.805	.027	.082
	N	33	33	33	33	33
RGUMURSD	Correlation Coefficient	-.140	-.150	-.181	-.148	-.114
	Sig. (2-tailed)	.437	.404	.314	.410	.528
	N	33	33	33	33	33
RGUMURSM	Correlation Coefficient	-.100	-.333	-.331	.079	-.133
	Sig. (2-tailed)	.580	.058	.060	.661	.460
	N	33	33	33	33	33
MURPKLSD	Correlation Coefficient	.101	-.013	-.044	.182	.188
	Sig. (2-tailed)	.575	.941	.810	.311	.295
	N	33	33	33	33	33
MURPKLSM	Correlation Coefficient	.201	-.248	-.241	.342	.126
	Sig. (2-tailed)	.263	.164	.177	.052	.486
	N	33	33	33	33	33

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

adalah Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 4.342.979 anak. Sedangkan rata-rata tiap propinsi adalah sebesar 775.680 anak.

Sedangkan jumlah anak lulusan SD yang terendah juga di propinsi Papua Barat dengan

jumlah 9.256. Demikian juga untuk anak lulusan SD terbanyak adalah propinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 647.328 anak. Jika dilihat dari rata-rata nasional untuk tiap propinsi jumlah anak lulusan SD adalah sebesar 110.825 anak.

Jumlah anak SMP yang terendah juga Propinsi Papua Barat yakni sebanyak 21.68 anak. Sedangkan jumlah terbesar ada pada Propinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.132.352 anak. Jumlah rata-rata nasional adalah 228.881 anak untuk tiap propinsi.

Propinsi dengan jumlah anak lulusan SMP terendah adalah propinsi Papua Barat dengan jumlah anak 255 anak. Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki jumlah anak lulusan SMP terbanyak yaitu 378.376 anak. Rata-rata jumlah anak lulusan SMP tiap propinsi secara nasional adalah 70.089 anak.

Deskripsi mengenai fasilitas pendidikan dapat dilihat dari rata-rata jumlah SD tiap propinsi yaitu sebesar 4.478 buah. Sedangkan jumlah SD terbanyak ada di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah 20.771 buah, propinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 675 buah SD yang merupakan jumlah terkecil dibandingkan dengan propinsi yang lain.

Propinsi dengan jumlah SMP terendah adalah Propinsi Papua Barat dengan jumlah 86 SMP. Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki jumlah SMP terbanyak yaitu sebesar 3.023 SMP. Rata-rata jumlah SMP secara nasional adalah 655 SMP tiap propinsi.

Sedangkan jika dilihat dari rasio guru dan murid SD, propinsi Sulawesi Barat menempati urutan teratas dengan rasio sebesar 25,84. Sementara rata-rata nasional adalah sebesar 18,3424. Propinsi Kalimantan Barat merupakan propinsi dengan rasio guru dan murid SD yang terendah yaitu sebesar 8,34.

Rasio guru dan murid SMP di Propinsi Banten sebesar 25,84 merupakan rasio terbesar. Sementara rata-rata nasional adalah sebesar 13,3149. Propinsi Maluku merupakan propinsi dengan rasio guru dan murid SMP yang terendah yakni sebesar 8,65.

Propinsi dengan jumlah murid per kelas di SD terkecil adalah propinsi Kalimantan Barat yaitu 10,87 murid per kelas. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan propinsi yang memiliki jumlah murid per kelas terbanyak yaitu sebesar 30,76 anak per kelas. Rata-rata jumlah murid per kelas secara nasional adalah 23,8754.

Sedangkan propinsi dengan jumlah murid per kelas di SMP terkecil adalah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu 27,06 murid per kelas. Propinsi Sumatra Utara merupakan propinsi yang memiliki jumlah murid per kelas di SMP terbanyak yaitu sebanyak 40,45. Rata-rata jumlah murid per kelas di SMP secara nasional adalah 34,7352.

Hasil korelasi Spearman untuk masing-masing variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel 6. dapat dilihat bahwa hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan harapan hidup manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,140; 0,158; 0,263 dan 0,316, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan mampu memberikan pemahaman yang cukup mengenai kehidupan misalnya dalam mengkonsumsi makanan, menjaga kesehatan, sehingga jika ditopang dengan variabel lain sehingga akan dapat meningkatkan harapan hidup.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan melek huruf di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,010; 0,003; -0,018 dan 0,016, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP maka jumlah melek huruf juga akan meningkat.

Sedangkan hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan lama sekolah di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar -0,050; -0,021; -0,003 dan 0,014, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP maka lama sekolah juga akan meningkat.

Hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan daya beli masyarakat di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,347; 0,422; 0,396 dan 0,460, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%), kecuali untuk variabel lulusan SMP yang memiliki hubungan yang signifikan dengan daya beli masyarakat. Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat karena dengan pendidikan yang cukup akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, berhemat dan mengelola keuangan pribadi secara baik.

Jika kita melihat hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,179; 0,210; 0,250 dan 0,316, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika

dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan semakin banyak orang yang mampu menjaga kesehatan, mengelola sumberdaya, dan meningkatkan kualitas hidup.

Jika dilihat dari hasil uji signifikansinya hampir semua variabel dari status pendidikan yakni jumlah murid SD, jumlah lulusan SD, jumlah murid SMP dan jumlah lulusan SMP tidak memiliki hubungan dengan komponen dari indeks pembangunan manusia maupun indeks pembangunan manusia. Hanya satu variabel yang signifikan yakni variabel jumlah lulusan SMP yang memiliki hubungan dengan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setingkat SMP ternyata mampu memiliki kemampuan secara ekonomi yang lebih.

Dari Tabel 6. dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan harapan hidup manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,120; 0,273; -0,140; 0,100; 0,101 dan 0,201, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Seharusnya semakin meningkatnya fasilitas pendidikan akan mampu meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga akhirnya akan meningkatkan pemahaman tentang menjaga kesehatan, pola konsumsi dan meningkatkan taraf hidup.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan melek huruf

Jumlah anak SMP yang terendah juga Propinsi Papua Barat yakni sebanyak 21.68 anak. Sedangkan jumlah terbesar ada pada Propinsi Jawa Barat dengan jumlah 1.132.352 anak. Jumlah rata-rata nasional adalah 228.881 anak untuk tiap propinsi.

Propinsi dengan jumlah anak lulusan SMP terendah adalah propinsi Papua Barat dengan jumlah anak 255 anak. Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki jumlah anak lulusan SMP terbanyak yaitu 378.376 anak. Rata-rata jumlah anak lulusan SMP tiap propinsi secara nasional adalah 70.089 anak.

Deskripsi mengenai fasilitas pendidikan dapat dilihat dari rata-rata jumlah SD tiap propinsi yaitu sebesar 4.478 buah. Sedangkan jumlah SD terbanyak ada di Propinsi Jawa Timur dengan jumlah 20.771 buah, propinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 675 buah SD yang merupakan jumlah terkecil dibandingkan dengan propinsi yang lain.

Propinsi dengan jumlah SMP terendah adalah Propinsi Papua Barat dengan jumlah 86 SMP. Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang memiliki jumlah SMP terbanyak yaitu sebesar 3.023 SMP. Rata-rata jumlah SMP secara nasional adalah 655 SMP tiap propinsi.

Sedangkan jika dilihat dari rasio guru dan murid SD, propinsi Sulawesi Barat menempati urutan teratas dengan rasio sebesar 25,84. Sementara rata-rata nasional adalah sebesar 18,3424. Propinsi Kalimantan Barat merupakan propinsi dengan rasio guru dan murid SD yang terendah yaitu sebesar 8,34.

Rasio guru dan murid SMP di Propinsi Banten sebesar 25,84 merupakan rasio terbesar. Sementara rata-rata nasional adalah sebesar 13,3149. Propinsi Maluku merupakan propinsi dengan rasio guru dan murid SMP yang terendah yakni sebesar 8,65.

Propinsi dengan jumlah murid per kelas di SD terkecil adalah propinsi Kalimantan Barat yaitu 10,87 murid per kelas. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan propinsi yang memiliki jumlah murid per kelas terbanyak yaitu sebesar 30,76 anak per kelas. Rata-rata jumlah murid per kelas secara nasional adalah 23,8754.

Sedangkan propinsi dengan jumlah murid per kelas di SMP terkecil adalah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu 27,06 murid per kelas. Propinsi Sumatra Utara merupakan propinsi yang memiliki jumlah murid per kelas di SMP terbanyak yaitu sebanyak 40,45. Rata-rata jumlah murid per kelas di SMP secara nasional adalah 34,7352.

Hasil korelasi Spearman untuk masing-masing variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel 6. dapat dilihat bahwa hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan harapan hidup manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,140; 0,158; 0,263 dan 0,316, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan mampu memberikan pemahaman yang cukup mengenai kehidupan misalnya dalam mengkonsumsi makanan, menjaga kesehatan, sehingga jika ditopang dengan variabel lain sehingga akan dapat meningkatkan harapan hidup.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan melek huruf di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,010; 0,003; -0,018 dan 0,016, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP maka jumlah melek huruf juga akan meningkat.

Sedangkan hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan lama sekolah di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar -0,050; -0,021; -0,003 dan 0,014, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP maka lama sekolah juga akan meningkat.

Hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan daya beli masyarakat di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,347; 0,422; 0,396 dan 0,460, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%), kecuali untuk variabel lulusan SMP yang memiliki hubungan yang signifikan dengan daya beli masyarakat. Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat karena dengan pendidikan yang cukup akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, berhemat dan mengelola keuangan pribadi secara baik.

Jika kita melihat hubungan antara status pendidikan yang meliputi jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,179; 0,210; 0,250 dan 0,316, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika

dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Secara umum seharusnya semakin banyak jumlah anak SD, jumlah lulusan SD, jumlah anak SMP dan jumlah lulusan SMP akan semakin banyak orang yang mampu menjaga kesehatan, mengelola sumberdaya, dan meningkatkan kualitas hidup.

Jika dilihat dari hasil uji signifikansinya hampir semua variabel dari status pendidikan yakni jumlah murid SD, jumlah lulusan SD, jumlah murid SMP dan jumlah lulusan SMP tidak memiliki hubungan dengan komponen dari indeks pembangunan manusia maupun indeks pembangunan manusia. Hanya satu variabel yang signifikan yakni variabel jumlah lulusan SMP yang memiliki hubungan dengan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setingkat SMP ternyata mampu memiliki kemampuan secara ekonomi yang lebih.

Dari Tabel 6. dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan harapan hidup manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,120; 0,273; -0,140; 0,100; 0,101 dan 0,201, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Seharusnya semakin meningkatnya fasilitas pendidikan akan mampu meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga akhirnya akan meningkatkan pemahaman tentang menjaga kesehatan, pola konsumsi dan meningkatkan taraf hidup.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan melek huruf

di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,022; 0,115; -0,150; -0,333; -0,013 dan 0,248, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Seharusnya semakin meningkat fasilitas pendidikan akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk sehingga akan mampu meningkatkan jumlah orang melek huruf.

Fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan lama sekolah manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar -0,082; 0,045; -0,181; -0,331; -0,044 dan -0,244, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Seharusnya semakin meningkat fasilitas pendidikan akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga lama sekolah dari manusia juga akan meningkat.

Kita juga dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan daya beli di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,320; 0,384; -0,148; 0,079; 0,182 dan 0,342, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%), kecuali variable jumlah SMP. Seharusnya semakin meningkat fasilitas pendidikan akan semakin memperbesar kesempatan memperoleh pendidikan, yang pada

akhirnya memiliki kemampuan untuk mendapat penghasilan yang lebih besar sehingga memiliki daya beli yang tinggi.

Hal yang dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah SD, jumlah SMP, rasio guru dan murid SD, rasio guru dan murid SMP, jumlah murid per kelas SD dan jumlah murid per kelas SMP dengan indeks pembangunan manusia di Indonesia memiliki hubungan yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi yang hanya sebesar 0,132; 0,307; -0,114; -0,133; 0,188 dan 0,126, dimana besarnya mendekati angka 0 sebagai nilai yang menunjukkan tidak ada hubungan. Jika dilihat nilai signifikansinya maka secara statistik tidak ada yang signifikan, hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (jika menggunakan taraf nyata 5%). Seharusnya semakin meningkat fasilitas pendidikan akan meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan.

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa status pendidikan dan fasilitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat tidak kuat dimana ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi yang hampir semua mendekati 0 (dimana hal tersebut menunjukkan tidak ada hubungan). Fenomena ini kiranya dapat dijelaskan bahwa ternyata ukuran status pendidikan yang yang diukur dari jumlah anak SD, SMP, jumlah lulusan SD dan SMP ternyata tidak mampu menggambarkan secara keseluruhan dari hasil pendidikan itu. Menurut hemat kami pendidikan juga dilihat dari proses pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh harian Kompas (Rabu, 5 September 2007, hal 14 "Catatan dari Papua: Pendidikan yang berjalan Mundur) di Papua banyak lulusan SD yang masih buta huruf, apalagi berhitung. Banyak anak-anak SMP tidak bisa baca tulis. Hal lain yang dapat disoroti seperti yang ditulis Kompas adalah bahwa semangat untuk memberikan yang terbaik bagi siswa oleh para guru jauh menurun dibandingkan dengan jaman Belanda, sebagai contoh adalah tentang disiplin guru. Hal lain adalah tidak

efektifnya fungsi pengawas yang ada, meskipun secara administratif ada pengawas, bahkan ditemui pengawas yang tak mengetahui lokasi sekolah. Saat ini masih menurut Kompas bahwa guru hanya disiapkan untuk mengajar di kelas, tetapi tidak mampu memberi motivasi dan memajukan masyarakat secara nyata, sehingga akan dihormati oleh masyarakat.

Kompas juga memperlihatkan kepada kita bahwa untuk pemanfaatan fasilitas ternyata di Papua masih banyak sekolah yang tidak beroperasi, gedung berdiri tanpa guru. Guru lebih suka mangkir dan keluyuran di kota sambil menunggu gaji. Keadaan saat ini di Papua tidak jauh berbeda dengan 50 tahun yang lalu anak-anak yakni dekil, berpenyakit kulit serta buta huruf dan angka.

Dari uraian di salah satu propinsi tersebut dapatlah dijadikan penjelasan bahwa status dan fasilitas pendidikan ternyata tidak mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang diukur dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan daya beli masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagian besar dari variabel yang menunjukkan status pendidikan tidak memiliki hubungan dengan pembangunan manusia. Dimana hanya variabel jumlah lulusan SMP yang memiliki hubungan dengan daya beli masyarakat. Hasil lain adalah sebagian besar dari variabel yang menunjukkan fasilitas pendidikan tidak memiliki hubungan dengan pembangunan manusia. Hanya variabel jumlah SMP yang memiliki hubungan dengan daya beli masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian dilakukan pada tahun yang sama sehingga kita hanya dapat melihat secara deskripsi bahwa antar variabel itu berhubungan atau tidak, tidak dapat dilihat sebagai hubungan sebab akibat. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan peneliti adalah: penelitian selanjutnya dilakukan penelitian untuk mendapatkan hubungan sebab akibat, sehingga lebih bermanfaat, penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan data

time series untuk pengamatan beberapa tahun, misalnya 10 tahun, fasilitas pendidikan dan status pendidikan seharusnya dapat dijadikan gambaran dari keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan maka perlu perlu diadakan evaluasi yang komprehensif tentang kebijakan yang berhubungan dengan fasilitas pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- _____, Business News, 7266/28-9-2005.
- _____, Dokumen SNP: Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 (www.tpkri.org.id).
- Cahyadin, Fery, Tujuan Pendidikan untuk Pembangunan: Mencari Alternatif Reformasi Pembangunan Pendidikan. (www.Geocities.com/vey212/tujpend1.htm).
- Jones, Gavin W and Hagul, Peter, 2001, "Scholling in Indonesia: Crisis Related and Longterm Issues", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol 37 No 2, hal 207-21.
- Kompas, Catatan dari Papua: Pendidikan yang berjalan Mundur, Rabu, 5 September 2007, hal 14.
- Mellington, Nicole and Cameron, Lisa, 1999, "Female Education and Child Mortality in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol 35 No 3, Desember, hal 115-144.
- Skoufias, Emmanule, 1999, "Parental Education and Child Nutrition in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol 35 No 1, April, hal 99-119.
- Steedman, Hilary, 1996, "Measuring the Quality of Education Output: A Note" Centre for Economic Performance, Discussion Paper No 302, August.
- Wicaksono, T Yudo, 2004, Besarkah Manfaat Pendidikan Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi, *Kompas* 21 Agustus 2004.
- Newman, John *et al.*, 2002, "An Impact Evaluation of Education, Health and Water Supply Investment by Bolivian Social Investment", *The World bank Economic Review*, Vol 16 No: 2 hal 241-274.
- Tampubolon, Mangatas, Pendidikan Pola pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan sesuai Tuntutan Otonomi Daerah, (www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm)